



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

2020

**BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI TAHUN 2020 UNTUK
PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021**



Jl.H.Abd.Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju

(0426) 2321806

Satker.kesbangpolsulbar@gmail.com



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

2019

Lampiran : Buku Inventarisasi Barang



Jl.H.Abd.MalikPattanaEndengKomp. PerkantoranMamuju

(0426) 2321806

Satker.kesbangpolsulbar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkenaan-Nyalah seluruh rangkaian program kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2019 dapat terlaksanakan dengan baik, walaupun mengalami beberapa hambatan proses pelaksanaannya.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan semua pihak untuk turut serta aktif dalam memaksimalkan hubungan antar instansi pemerintah baik di provinsi maupun di pusat dengan baik, meningkatkan SDM yang berkualitas, meningkatkan hubungan antara supra dan infra struktur politik semakin baik, dan adanya Ormas, LSM dan organisasi profesi yang semakin berkualitas dalam berpartisipasi menangani pelaksanaan pembangunan di segala bidang serta tidak terlepas daripada adanya rasa kebersamaan dalam kesatuan bangsa dan masyarakat.

Laporan ini berisikan seluruh rangkaian pelaksanaan program / kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sepanjang Tahun Anggaran 2019 yang dalam penyusunannya tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Saran dan perbaikan kami harapkan guna lebih menyempurnakan laporan ini sebagai bahan acuan dan pedoman untuk menyusun program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya guna meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Mamuju, 12 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Lampiran.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Gambaran Umum SKPD.....	1
I.2. Tupoksi SKPD.....	3
a. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
b. Struktur Organisasi.....	4
I.3. Sumber Daya Manusia.....	6
I.4. Sarana dan Prasarana.....	7
I.5. Inventarisasi Aset.....	13
I.6. Informasi Pelayanan.....	13
BAB II. DOKUMEN PERENCANAAN.....	15
II.1. Rencana Strategis.....	15
II.2. Rencana Kerja Tahunan.....	19
BAB III. DATA KINERJA DAN KEUANGAN.....	21
III.1. Data Kinerja SKPD.....	21
III.2. Data Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib.....	22
III.3. Data Realisasi Keuangan.....	24
BAB IV. PENUTUP.....	26
IV.1. Kesimpulan.....	26
IV.2. Saran.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Pendidikan	6
Tabel 2. Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Golongan.....	6
Tabel 3. Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Jenjang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Struktural.....	7
Tabel 4. Inventaris / Peralatan Kantor.....	8
Tabel 5. Kendaraan Dinas.....	12
Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	21
Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2017-2022.
2. RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
3. RKA / DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
4. RKAP / DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
5. Daftar Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
6. Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan dan Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
8. SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
9. Foto Papan Pengumuman, Telepon / Fax dan Sistem Aplikasi SMS Gateway Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
10. Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. GAMBARAN UMUM

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keanekaragaman sosial, budaya, agama dan bahasa yang kesemuanya itu mengandung potensi kerawanan yang rentan terhadap gejolak internal dan eksternal. Disamping itu kondisi geografis Indonesia juga berpotensi rawan atas terjadinya bencana baik bencana alam, perang maupun karena ulah manusia.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara faktual dihadapkan pada berbagai problem dan kendala aktual baik dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam lingkup daerah, maka tantangan utama yang akan dihadapi daerah Provinsi Sulawesi Barat di waktu mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan sistem politik yang demokratis dan partisipatif. Tantangan ini sekaligus juga akan menjadi dasar penentu arah pembangunan politik dalam negeri di daerah ke depan.

Oleh karena itu dengan pertimbangan bobot peran dan tanggungjawab pemerintah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang termasuk dalam **Urusan Wajib** yang bertugas melaksanakan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di masa datang. Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6), pada Bab VII diatur pada Ketentuan Peralihan Pasal 9 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 yaitu membantu Gubernur dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri 11 tahun 2019, merupakan Penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan dengan berlandaskan Pasal 20 Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka mensukseskan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 maka telah disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis tersebut diatas, maka perlu disusun program kerja tahunan yang memuat berbagai rencana kerja operasional tahunan yang diharapkan secara akumulatif selama lima tahun dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap komponen penyelenggaraan fungsi dan pembinaan kesatuan bangsa dan khususnya jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, serta referensi bagi pengembangan rencana kerja operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilingkup Kabupaten / Kota se-Sulawesi Barat.

❖ URUSAN WAJIB BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT**➤ Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yaitu :**

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri.
- Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
- Program Pembinaan Karakter Bangsa.

I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

a. *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.*

1. Sekretariat Badan.

Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat Badan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Anggaran bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kerja.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan

Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan Kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

3. Bidang Politik Dalam Negeri.

Bidang Politik Dalam bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan, demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan
- 4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.**

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

- penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini,

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

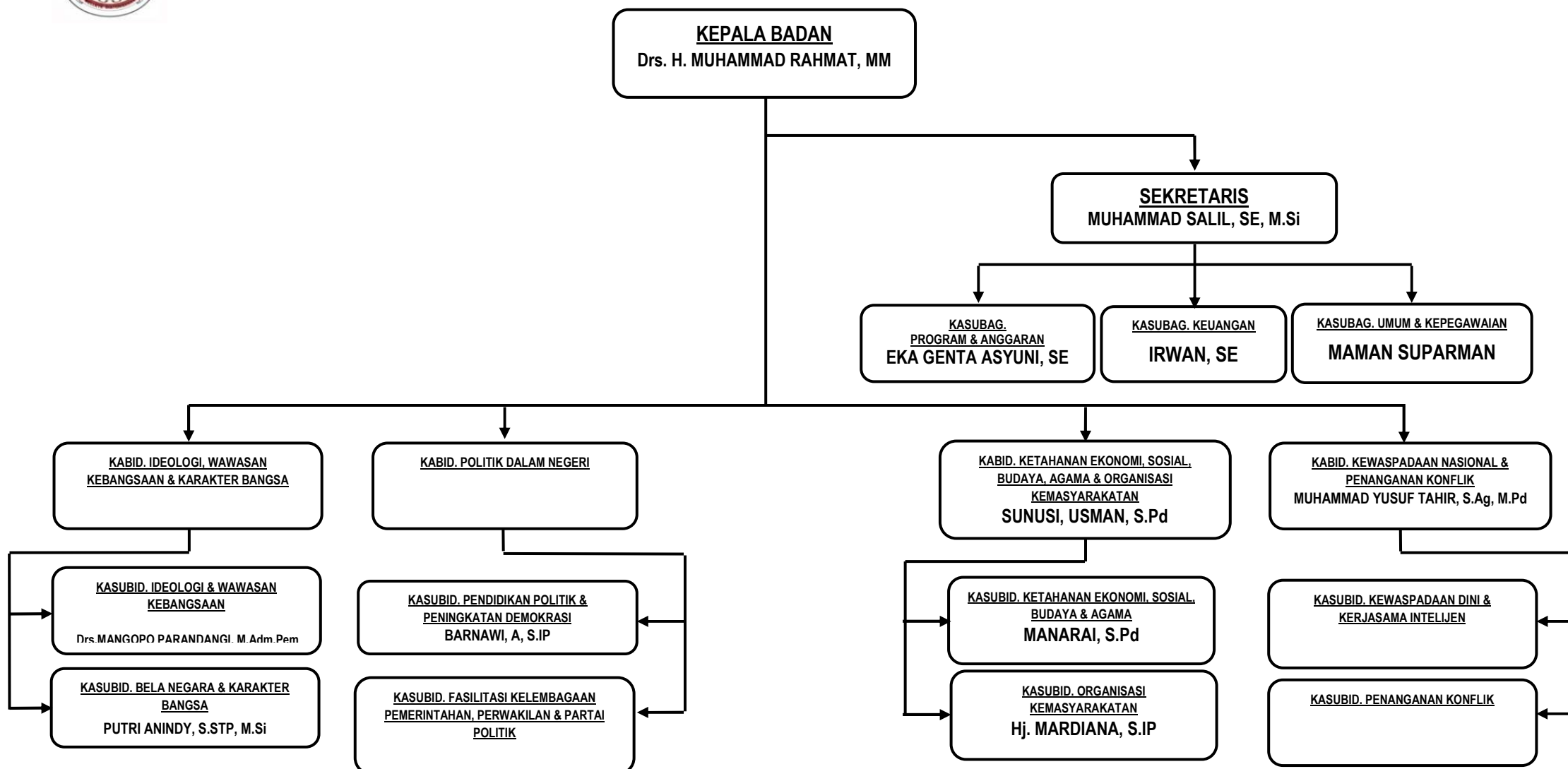
Sub Bidang Kewaspadaan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

b. Struktur Organisasi

Dari Tugas dan Fungsi Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada struktur organisasi Tahun 2017-2022 sebagai berikut:



**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)**1.3. SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam pembahasan ini diuraikan gambaran singkat organisasi yang memuat sumber daya manusia pembinaan staf serta pengaruh kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal).

- **Tabel 1.** Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SMP	0	
2.	SMA	6	
3.	SARJANA MUDA (D1 s/d D3)	4	
4.	STRATA 1 (S1)	20	
5.	STRATA 2 (S2)	8	
	Jumlah	38	

- **Tabel 2.** Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Golongan :

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	5	
2.	III	27	
3.	II	6	
4.	I	0	
	Jumlah	38	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

- **Tabel 3.** Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Jenjang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Struktural :

No.	DIKLAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Diklatpim Tk.I	-	
2.	Diklatpim Tk.II	1	
3.	Diklatpim Tk. III	6	
4.	Diklatpim Tk.IV	8	
	JUMLAH	15	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Eselon & Struktur Organisasi :

a. Eselon II	=	1	Orang
b. Eselon III	=	3	Orang
c. Eselon IV	=	8	Orang
d. JFU	=	26	Orang
		<hr/>	
Jumlah		38	Orang

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Jenis Kelamin :

1. Laki-Laki	: 26	Orang
2. Perempuan	: 12	Orang

Jumlah : 38 Orang

I.4. SARANA PRASARANA

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat meliputi : inventaris / peralatan kantor dan kendaraan dinas.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

❖ Inventaris / Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri atas meubelair, peralatan, komputer, serta peralatan kantor lainnya. Inventaris dan peralatan tersebut diperoleh melalui pengadaan dari anggaran rutin dan pembangunan.

Tabel 4. Inventarisasi / Peralatan Kantor

No.	Jenis	Jumlah	Thn. Pengadaan
1	Meja Kayu/Rotan	2 bh	2005
2	Kursi Besi/Metal	3 bh	2005
3	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2 bh	2005
4	Meja Komputer	1 bh	2005
5	Meja Biro	1 bh	2005
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 bh	2005
7	Sepeda Motor	1 bh	2005
8	Mobil Dinas	1 bh	2006
9	Sepeda Motor	4 bh	2006
10	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 bh	2006
11	Lemari Kaca	1 bh	2006
12	Lemari Kayu	1 bh	2006
13	Rak Kayu	1 bh	2006
14	Kursi Besi/Metal	4 bh	2006
15	Meja Rapat	1 bh	2006
16	Meja Makan	1 bh	2006
17	Kursi Putar	1 bh	2006
18	Meja Komputer	3 bh	2006
19	Meja Biro	20 bh	2006
20	Sofa	1 bh	2006
21	Jam Elektronik	1 bh	2006
22	Lemari Es	1 bh	2006

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

23	Kipas Angin	1 bh	2006
24	Televisi	1 bh	2006
25	CPU	1 bh	2006
26	Printer	2 bh	2006
27	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 bh	2006
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 bh	2006
29	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 bh	2006
30	Unit Transceiver HF Portable	1 bh	2006
31	Meja Kerja	1 bh	2006
32	Sepeda Motor	2 bh	2007
33	Portable Generating Set	1 bh	2007
34	Papan Pengumuman	1 bh	2007
35	Lemari Kayu	1 bh	2007
36	Filling Besi/Metal	6 bh	2007
37	Meja Kayu/Rotan	3 bh	2007
38	Kursi Besi/Metal	1 bh	2007
39	Kursi Rapat	1 bh	2007
40	Sofa	1 bh	2007
41	Dispenser	1 bh	2007
42	PC Unit	1 bh	2007
43	Laptop	1 bh	2007
44	Printer	3 bh	2007
45	Buffet Kayu	1 bh	2007
46	Slide Projector	1 bh	2007
47	Mesin Ketik Listrik Portable	1 bh	2008
48	Mesin Foto Copy Dengan Kertas Folio	1 bh	2008
49	Mesin Ketik Standar	1 bh	2008
50	Rak Kayu	1 bh	2008
51	Lemari Makan	1 bh	2008
52	AC Split	1 bh	2008

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

53	Printer	1 bh	2008
54	Televisi	1 bh	2008
55	Laptop	2 bh	2008
56	Monitor	1 bh	2008
57	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 bh	2008
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 bh	2008
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 bh	2008
60	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	1 bh	2008
61	Loudspeaker	1 bh	2009
62	PC Unit	1 bh	2009
63	Note Book	1 bh	2009
64	Hard Disk	3 bh	2009
65	Printer	1 bh	2009
66	Unit Transceiver SSB Portable	1 bh	2009
67	Mesin Ketik Standar	1 bh	2010
68	Unit Power Supply	2 bh	2010
69	Handy Cam	1 bh	2010
70	PC Unit	1 bh	2010
71	Printer	1 bh	2010
72	Proyektor + Attachment	1 bh	2010
73	Sofa	1 bh	2012
74	Sepeda Motor	3 bh	2013
75	Lemari Besi	3 bh	2013
76	AC Split	1 bh	2013
77	Handy Cam	1 bh	2013
78	PC. Unit	1 bh	2013
79	Laptop	10 bh	2013
80	Printer	5 bh	2013
81	Scanner	1 bh	2013
82	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 bh	2013

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

83	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11 bh	2013
84	Kursi Pejabat Eselon III	1 bh	2013
85	Kursi Pejabat Eselon IV	11 bh	2013
86	Camera Electronic	2 bh	2013
87	Mobil Jabatan Inova	1 unit	2014
88	Mobil Operasional Avanza Velos	1 unit	2014
89	Motor Supra CW-F1	1 unit	2014
90	Motor Verza CW-150	2 unit	2014
91	Lemari Arsip/kayu	3 unit	2014
92	Lemari Filing Kabinet	1 unit	2015
93	Lemari Es / Kulkas	1 Unit	2015
94	Meja Rapat	1 Unit	2015
95	Kursi Kerja	10 bh	2015
96	Rak Buku	1 Paket	2015
97	Mobil	2 Unit	2016
98	Lemari Arsip	5 bh	2016
99	Laptop	5 bh	2016
100	Komputer Desktop	4 bh	2016
101	Printer	5 hh	2016
102	Meja Esalon II	1 bh	2016
103	Kursi Esalon II	1 bh	2016
104	Kursi Staf	15 bh	2016
105	Foto Copy	1 bh	2016
106	AC Standing	1 bh	2016
107	AC Split	1 bh	2016
108	Power Suplay RTV 8010	1 bh	2016
109	Server SMS Gateway	1 bh	2016
110	Televisi	1 unit	2017
111	Komputer Desktop	4 unit	2017
112	Laptop	3 unit	2017

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

113	Printer	3 unit	2017
114	Meja Kerja	12 unit	2017
115	Meja Kerja	1 unit	2017
116	Komputer Dekstop	2 unit	2018
117	Komputer Dekstop	1 unit	2018
118	Printer	3 unit	2018
119	Printer	4 Unit	2019
120	Lemari Arsip	3 Unit	2019
121	CCTV	1 Paket	2019

❖ **Kendaraan Dinas**

Kendaraan dinas yang dimiliki sebanyak 4 (Empat) unit kendaraan roda empat yang terdiri atas 1 (Satu) unit untuk Eselon II Kepala Badan, 1 (Satu) unit untuk Operasional Eselon III Sekretaris, 2 (Dua) unit untuk Operasional Eselon III Kepala Bidang serta 16 (Enam Belas) unit kendaraan roda dua yang terdiri dari dan di uraikan sebagai berikut :

Tabel 6. Kendaraan Dinas

No.	Jenis	Merk/Type	Unit	Thn.Perolehan
1.	Motor	Suzuki/FD 125 XSD	1	2005 APBD
2.	Mobil	Toyota/ Kijang Inova	1	2006 APBD
3.	Motor	Honda Supra/ NF 125 SD	4	2006 APBD
4.	Motor	Suzuki shogun/ FL 125 RCMD Honda Supra/ NF 100 SL	2	2007 APBD
5.	Motor	Honda / NF 125 TR	3	2013 APBD
6.	Mobil	Toyota/ Kijang Inova G Luxury	1	2014 APBD
7.	Mobil	Toyota/Avanza Velos	1	2014 APBD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

8.	Motor	Honda Supra/ CW F1	1	2014 APBD
9.	Motor	Honda Verza/ CW 150	2	2014 APBD
10.	Mobil	Xenia Deluxe	2	2016 APBD
11.	Motor	Honda Verza /GL.15B1DF M/T	3	2016 APBD

Kendaraan dinas roda empat sebanyak 4 (Empat) unit masih layak pakai, sejumlah kendaraan dinas roda dua sebanyak 18 (Delapan Belas) unit yang ada hanya 5 (Lima) unit yang tidak layak pakai.

I.5. INVENTARISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT.

Barang Inventarisasi Aset yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat banyak yang sudah tidak layak lagi untuk dipakai atau digunakan, oleh karena barang-barang tersebut sering dipindah-pindahkan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat belum mempunyai gudang tetap untuk menyimpan barang inventarisasi asset tersebut, maka dari itu keamanan barang inventaris tidak dapat dijamin keamanannya.

Di samping itu barang inventarisasi yang masih digunakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah kebanyakan barang-barang yang sudah tidak layak pakai diantaranya meubilir-meubilir sehingga kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari kadang bergantian.

I.6. INFORMASI PELAYANAN SKPD

Sejauh ini ada informasi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat antara lain yaitu :

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

- ❖ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terdeteksinya gejala gangguan Kamtibmas dan mewujudkan stabilitas keamanan Se-Provinsi Sulawesi Barat.
- ❖ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya ada suatu wadah yang berfungsi untuk mensosialisasikan perwujudan kondisi Kamtibmas yang stabil sehingga dapat mendukung pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material.
- ❖ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya ada suatu wadah yang berfungsi memfasilitasi dialog antar umat beragama yang dikemas dalam suatu forum umat beragama.
- ❖ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya merupakan suatu wadah yang memfasilitasi dan membina, menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi konflik, gejala atau peristiwa bencana alam maupun bencana ulah manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini.
- ❖ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya menjadi suatu wadah yang bertujuan untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada ORMAS dan Organisasi Nirlaba Lainnya lewat media mensosialisasikan tata cara pendaftaran serta memberdayakan organisasi-organisasi tersebut dengan cara menjalin kemitraan organisasi masyarakat.

BAB II.**DOKUMEN PERENCANAAN****II.1. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi dan konsultasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan data dan informasi dibutuhkan peran aktif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengumpulkan, mengolah dan memelihara berbagai data dan informasi instansi berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tiap-tiap perangkat daerah. Dengan pengembangan data dan informasi tersebut diharapkan data dan informasi dapat terdokumentasi secara baik dan berguna bagi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Renstra Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Sejalan dengan hal tersebut, Perencanaan Penyusunan Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu tahapan dari siklus perencanaan pembangunan daerah dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan yakni meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tugas dan tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat terfokus pada upaya terwujudnya dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil terhadap Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dan penggunaan teknologi begitu cepat di era reformasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mampu, dan mau berperan aktif lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien serta mendukung penciptaan stabilitas politik serta pemerintahan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan adanya peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Sulawesi Barat, keamanan dan ketentraman serta ketertiban dalam Ruang Lingkup Kepala Daerah / Para Pejabat Daerah sehingga aktivitas Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan lancar.

Sehubungan dengan upaya pengembangan data dan informasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana serta keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang merupakan program kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang termuat pada dokumen perencanaan Renstra periode 2017-2022. Bentuk dari pengembangan data dan informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yaitu telah dibuatnya website / situs profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai media dalam pendeskripsian / gambaran kinerja tugas pokok dan fungsi dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Selain penyajian kinerja pada website tersebut menampilkan sejumlah data-data hasil yang dicapai.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, yang mengantarkan **Bapak H. M. ALI BAAL MASDAR** sebagai Gubernur ke-2 di Provinsi

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Sulawesi Barat. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Mandar / Sulbar yang aman dan damai, adil dan makmur.

Pemerintah Daerah Sulawesi Barat telah merumuskan program-program strategis dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang tercermin dalam Visi Daerah sebagai daerah :

“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBIQ”

Untuk mencapai kondisi yang telah digambarkan dalam VISI tersebut, Pemerintah Daerah bersama jajarannya telah melakukan menufer-menufer penting dalam pembangunan yang dititikberatkan pada Pembangunan pada Bidang infra struktur, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu perangkat daerah dengan tugas pokoknya sebagai penegak PERDA, serta menyelenggarakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan perangkat pemerintah daerah kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban adalah satu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat sesungguhnya manusia baik sebagai perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah terhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan. Untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan manusia didalam hubungan masyarakat atau pergaulan perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain.

Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa yang aman, tentram dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila keamanan, ketentraman dan ketertiban

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

dapat terwujud dengan baik dan sesuai dengan harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya.

Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat Negara atau aparat Negara yang ditugaskan menurut undang-undang atau peraturan dibawahnya Peraturan Daerah.

Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan maupun program/kegiatan tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJMN. Rencana Strategis SKPD juga harus memperhatikan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Lembaga (K/L) dan Renstra Kabupaten/Kota agar perencanaan pembangunan diharapkan bisa lebih sinergi sesuai dengan bidang masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menyusun Dokumen Rancangan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen Rancangan Rencana Strategis yang telah disusun tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai tujuan akhir daripada Renstra itu sendiri.

Keterkaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

sesuai dengan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

“(1) Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas; dan (2) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya”.

II.2. RENCANA KERJA TAHUNAN

1) Program Prioritas Nasional (yang diatur dalam Permendagri No.22 Thn 2012)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Kami khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tidak mempunyai program-program kegiatan yang diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2012. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat hanya mempunyai 2 program inti yaitu Program Nasional Urusan Wajib dan Program SKPD.

2) Program Nasional Urusan Wajib SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- Program Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Program Pembinaan Karakter Bangsa.
- Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
- Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri.
- Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

- Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

3) Program SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri.
- Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
- Program Pembinaan Karakter Bangsa.

BAB III.**DATA KINERJA DAN KEUANGAN****III.1. DATA KINERJA SKPD.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka jenis pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat;
2. Menyelenggarakan pembinaan bawahan di lingkungan badan;
3. Menyelenggarakan pengendalian dalam pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan;
5. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
6. Menyelenggarakan penyampaian konsep program kerja di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Gubernur;
7. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
8. Menyelenggarakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

➤ **Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Realisasi Capaian Tahun Ke-													Analisis Indikator
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Jumlah Demo Bidang Politik.	0	0	29	21	10	10	15	52	1	0	3	13		
2.	Jumlah Demo Ekonomi.	0	0	9	12	5	0	2	40	0	3	0	35		
3.	Jumlah Kasus Pemogokan Kerja.	0	0	2	7	6	0	0	0	0	0	0	2		
4.	Jumlah Demo Unjuk Rasa.	0	0	0	0	0	0	15	30	3	2	65	50		

III.2. DATA KINERJA URUSAN WAJIB.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan fasilitas, SDM yang berkualitas dan berkinerja, mewujudkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, dinamika nilai-nilai sosial budaya, agama, ekonomi, Ormas, pembinaan Ideologi	Meningkatnya fasilitas SDM yang berkualitas, memenuhi pelayanan prima, memenuhi fasilitas sarana dan prasarana aparatur, kualitas disiplin aparatur, kualitas kapasitas SDM aparatur serta meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Peningkatan SDM yang berkualitas dan berkinerja.	38 Orang SDM Aparatur PNS dan 35 Orang Non PNS.	100%
2.	Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pendidikan etika budaya politik serta fasilitas kelembagaan Partai Politik.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Terciptanya pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, pelatihan dan rapat koordinasi.	90%
3.		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa	Terciptanya pembinaan karakter bangsa dan pembinaan Ideologi Pancasila.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, pelatihan dan rapat koordinasi.	90%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

4.		dan bernegara.	Terciptanya pembinaan Ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan dan Bela Negara.	Persentase yang mengikuti sosialisasi, pelatihan dan rapat koordinasi.	90%
5.		Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Terciptanya pemahaman tentang pendidikan etika dan budaya politik.	Persentase yang paham akan pendidikan etika dan budaya politik.	90%
6.		Meningkatnya fasilitasi kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Terfasilitasinya dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Jumlah parpol yang terverifikasi, indikator IDI dan kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.	10 Parpol, 42 Indikator dan 5 Dokumen Laporan.
7.		Menguatnya pembinaan Ormas,	Tertanamnya rasa solidaritas pada	Jumlah peserta yang	40 Org &

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

		pencegahan penyalahgunaan Narkotika, pengembangan ekonomi, sosial, budaya, agama dan Orgasasi Kemasyarakatan.	masyarakat.	mengikuti program kegiatan pemahaman seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dan Jumlah Ormas / LSM yang terdaftar dan memperoleh SKT.	10 Ormas
8		Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.	Terciptanya stabilitas pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi.	40 Org

III.3. DATA KEUANGAN.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pada tahun 2019 Belanja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.

a. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menganggarkan dengan Pagu Belanja Langsung sebesar **Rp.4.802.000.000.00,-** dan mengalami rasionalisasi anggaran sebesar **Rp.66.480.360.26,-** sehingga pagu berubah menjadi **Rp.4.868.480.360.26,-** dengan Realisasi Anggaran sebesar **Rp.4.649.968.603,00,-** atau **(95,51%)** serta realisasi fisik **100%** yang secara rinci dapat dilihat pada Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 (terlampir).

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. pada Tahun Anggaran 2019 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menganggarkan dengan Pagu

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.4.090.101.759.92,-** tetapi menjelang akhir tahun mengalami perubahan dan pengurangan sebesar **Rp.364.950.724.92,-** sehingga pagu berubah menjadi **Rp.3.725.151.035.00,-** sedangkan Realisasinya sebesar **Rp.3.655.333.213,00,-** atau **(98,13%)** yang secara rinci dapat dilihat dalam Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 (terlampir).

BAB IV.

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

✚ LPPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan suatu laporan yang menggambarkan tatanan pelaksana kebijakan 8 aspek administrasi umum dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun Anggaran 2019. Ada 8 aspek administrasi umum yaitu :

- Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggara Urusan Pemerintahan.
- Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- Aspek Ketaatan Kelembagaan Daerah.
- Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah.
- Aspek Perencanaan Pembangunan.
- Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat.

✚ LPPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan suatu laporan yang menggambarkan tatanan pelaksanaan kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun Anggaran 2019. Kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

- **Urusan Kesatuan Bangsa & Politik dengan Indikator yaitu :**
 1. **Kegiatan Pembinaan Terhadap Ormas dan OKP (Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap Ormas dan OKP).**
 2. **Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik).**

✚ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terdeteksinya gejala gangguan Kamtibmas dan mewujudkan stabilitas keamanan se-Provinsi Sulawesi Barat.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

- ✚ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya ada suatu wadah yang berfungsi untuk mensosialisasikan perwujudan kondisi Kamtibmas yang stabil sehingga dapat mendukung pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material.
- ✚ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya ada suatu wadah yang berfungsi memfasilitasi dialog antar umat beragama yang dikemas dalam suatu forum umat beragama.
- ✚ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya merupakan suatu wadah yang memfasilitasi dan membina, menjanging, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi konflik, gejala atau peristiwa bencana alam maupun bencana ulah manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini.
- ✚ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya menjadi suatu wadah yang bertujuan untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada ORMAS dan Organisasi Nirlaba Lainnya lewat media mensosialisasikan tata cara pendaftaran serta memperdayagunakan organisasi-organisasi tersebut dengan cara menjalin kemitraan organisasi masyarakat.

IV.2. SARAN-SARAN

Untuk mencapai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat secara maksimal diharapkan dukungan dan segenap unsur yang terkait / stakeholders agar apa yang telah diprogramkan berjalan sesuai dengan jadwal.

Mamuju, 12 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

Penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tersebut yaitu :

❖ *Program Pendidikan Politik Masyarakat.*

- *Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula.*

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula sebagai Negara demokratis, Kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan, dimana kehadirannya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat, penyeimbang kekuatan politik serta sebagai saran pengkritik dan kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik biasa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang, sehingga diberikanlah pendidikan politik bagi masyarakat oleh parpol dan lembaga demokrasi lainnya baik di Provinsi dan Kabupaten di seluruh Indonesia.

❖ Program Fasilitas Politik Dalam Negeri.**• *Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.***

Kegiatan Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik. Peran partai politik dewasa ini sangat signifikan dalam sistem politik di Indonesia karena menjadi poros penting dalam proses demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga Negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat kedalam sistem politik. Untuk itu politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar politik untuk mempersentasekan rakyat, menyeimbangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik.

- ✚ Untuk mengetahui besaran bantuan keuangan partai politik Tahun 2019.
- ✚ Untuk mengetahui tata cara penghitungan dan penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat.
- ✚ Untuk mengetahui tata cara pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan partai politik.
- ✚ Untuk mengetahui tata cara penggunaan bantuan keuangan partai politik.
- ✚ Untuk mengetahui tata cara laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
- ✚ Agar terjalinnya sinergitas antara pihak parpol sebagai penerima bantuan, pemerintah sebagai penyedia anggaran, dan tim Verifikasi yang mengevaluasi dan merekomendasikan.
- ✚ Terciptanya suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan partai politik.

- ***Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.***

Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah bahwa dalam proses reformasi yang dimulai sejak pertengahan tahun 1998 telah melahirkan fenomena sosial politik baru dimasyarakat kita, dimana tuntutan akan demokrasi yang sedemikian majemuk, sampai-sampai demokrasi terposisi menjadi tujuan dan bukan lagi sekedar sarana pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi tersebut perlu dilihat kembali sistem politik demokratis yang sejuk dan santun.

- ✚ Melakukan pemantau, pelaporan dan evaluasi situasi politik dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Daerah Serentak Sulawesi Barat Tahun 2019 secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan.

- ✚ Untuk mengetahui perkembangan politik dan persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak Sulawesi Barat 2019 dalam menciptakan stabilitas politik pemerintah yang kondusif di daerah.

- ***Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Sulbar.***

Kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Sulbar sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratis yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem - sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi politik nasional dewasa ini. Disamping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung oleh penyelenggara pemerintah yang profesional dan terbebas dari praktik - praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di pusat dan di daerah.

2. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tersebut yaitu :

❖ *Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.*

• *Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan Ormas.*

Kegiatan Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan Ormas merupakan yang telah membentuk tim yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan data dan informasi berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan Ormas, melakukan registrasi identifikasi serta penanganan Ormas dan melakukan monitoring dan evaluasi tidak lanjut pembinaan fasilitasi, identifikasi Organisasi Kemasyarakatan. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah perlunya identifikasi, evaluasi dan penanganan Ormas, dalam menciptakan tertib administrasi dari Ormas tersebut dan juga dapat diketahui perkembangan dari Organisasi Masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan itu sangat relevan untuk terus menerus memberikan evaluasi identifikasi dan langkah-langkah yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah sehingga mampu menciptakan tata kelola terkait Dinamika Organisasi tersebut.

• *Dialog Pemerintah dengan Ormas.*

Kegiatan Dialog Pemerintah Dengan Ormas Dinamika perkembangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan perubahan sistem pemerintah, membawa paradigma baru tata kelola ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas sebaran dan jenis kegiatan dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas, untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

🚩 Kegiatan kerjasama pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dimaksudkan sebagai wadah komunikasi, koordinasi difasilitasi serta

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

upaya membina, memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kerjasama demi kemajuan Provinsi Sulawesi Barat yang Mala'biq.

- ✚ Dimaksudkan sebagai upaya membina, memelihara dan meningkatkan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang fungsi, hak dan kewajiban ormas di Provinsi Sulawesi Barat.
- ✚ Untuk membangun sinergitas antara Ormas yang berada di Provinsi Sulawesi Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menyamakan persepsi tentang ketugasan dan mekanisme kerja.
- ✚ Untuk peningkatan kapasitas fungsi dan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) di Provinsi Sulawesi Barat.
- ✚ Terjalannya komunikasi dan koordinasi serta terciptanya kesamaan langkah dan tindak antara organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dan Pemerintah Provinsi yang berada di Provinsi Sulawesi Barat.
- ✚ Tentang arti pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan nasional, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha Bela Negara dalam rangka pemantapan ketahanan nasional demi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI.
- ✚ Terbinanya Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendukung peran pemerintah dengan menjadi juru damai dan penjaga keamanan dari kemungkinan konflik-konflik antar kepentingan dalam masyarakat.
- ✚ Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan politik dalam negeri, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota dengan Ormas dan lembaga nirlaba lain. sehingga diharapkan peran sosial kontrol dapat dijalankan lebih maksimal.

❖ ***Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.***

- ***Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Umat Beragama.***

Kegiatan Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama merupakan kegiatan yang membahas tentang kerukunan hidup

beragama yang merupakan suasana komunikasi yang harmonis dalam dinamika interaksi antar umat beragama, baik interaksi sosial maupun antar kelompok keagamaan. Kerukunan tersebut tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampingan secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan dan beribadat sesuai dengan ajaran agama yang dianut, serta adanya kesediaan dan kemauan melakukan kerjasama sosial dalam membangun masyarakat dan bangsa.

FKUB kelak akan berperan besar yang tidak hanya menyangkut persoalan kerukunan, namun juga menyangkut pemberdayaan umat secara keseluruhan. Artinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah yang tidak hanya bekerja menjembatani aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah. Namun lebih dari itu, sebagai “kendaraan” dalam rangka akselerasi penyelesaian persoalan-persoalan umat beragama di lapangan. Peran ini sangat beralasan, mengingat bahwa kedepan kiranya Forum ini dituntut untuk tidak hanya sekedar memfokuskan diri pada hal-hal yang menyangkut banyak kepentingan dan hal-hal yang luas lagi termasuk membangun berbagai kerjasama dalam hal pemberdayaan umat yang terpuruk akibat ketimpangan sosial serta berbagai persoalan yang ditinggalkan akibat konflik.

- ***Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama se-Sulbar.***

Kegiatan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama Indonesia adalah termasuk Negara yang penduduknya majemuk dalam suku, adat, budaya dan agama. Kemajemukan dalam hal agama terjadi karena masuknya agama – agama besar ke Indonesia. Perkembangan agama – agama tersebut telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, dimana kehidupan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Suatu bukti dalam hal ini dapat dilihat dalam kenyataan bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah, sangat dipengaruhi antara lain oleh motivasi agama. Selain itu inspirasi dan aspirasi keagamaan tercermin dalam rumusan Pancasila dan Undang – Undang dasar 1945.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

- ✚ Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkan kembangkan kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama di Provinsi Sulawesi Barat.
- ✚ Dimaksud sebagai wadah komunikasi, koordinasi serta upaya membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan dan kerukunan dalam menjalankan agama.
- ✚ Menjalin komunikasi dan koordinasi serta kesamaan langkah dan tindak dalam upaya membangun kerukunan umat beragama serta mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi kehidupan beragama di Provinsi Sulawesi Barat.
- ✚ Membangun dan menciptakan rasa toleransi kerukunan umat beragama di wilayah Sulawesi Barat.
- ✚ Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama di Provinsi Sulawesi Barat.
- ✚ Identifikasi permasalahan moral agama yang mempengaruhi generasi muda Sulawesi Barat.

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak 6 kabupaten kota . Kab/kota usia di atas 3 tahun dan kepala daerah terpilih 6 kab $\frac{6}{6} \times 100 \% = 100 \%$	100 %	Dasar Hukum: PP Nomor 36 Th 2005 (psl. 112) Permen PUPR No.5 Tahun 2016 tentang IMB Pasal 52
		Peraturan ttg Ketertiban Umum	2	Kab/kota memiliki perda tentang Ketertiban Umum	Jumlah Kab/Kota memiliki Perda Ketertiban Umum dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPDx100%	- Kab/Kota yang memiliki perda Ketertiban Umum, sebanyak 6 daerah - Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD 6 sebanyak daerah. $\frac{6}{6} \times 100 \% = 100 \%$	100 % (Agregasi)	Dasar Hukum: Permendagri no 121 Tahun 2018 tentang SPM Trantibum psl 1 nomor 5
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGA N OTONOMI	Penyampaian laporan kepada Pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 13 Tahun 2019	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: LPPD Tahun 2019 disampaikan pada Tanggal 26 Februari 2020 sesuai surat pengantar Nomor 008.0705/131.b/BKBP	Tepat/ Tidak Tepat	Dasar Hukum: PP No. 13 Tahun 2019 tentang LEPPD Pasal 11
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporankinerja berdasarkan PP8/2006	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan tahun 2019, disampaikan pada tanggal 6 Februari 2020 sesuai surat pengantar Nomor-----tanggal----- --2020 - Laporan Kinerja tahun 2019.	-Tepat/ Tidak Tepat -Tepat/	Dasar Hukum: - Kemenkeu Peraturan Dirjen Perbendaharaan No 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Klnerja	Keterangan
	DAERAH					Disampaikan pada tanggal 12 Februari 2020 sesuai surat pengantar Nomor 008.02/92/BKBP Tanggal 12 Februari 2020	Tidak Tepat	LKPasal 9 - Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 296 ayat 1
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi <u>Jumlah prioritas 1 pembangunan nasional</u>	- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak 13 program. - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak 8 program $\frac{13}{8} \times 100 \% = 1,63 \%$	1,63%	Sumber Hukum : Lampiran Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019,
		Kepegawaian	15	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk	- Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 sebanyak 5.448 orang. - Jumlah penduduk provinsi tahun 2019 sebanyak 1.559.991 orang. $\frac{5.488}{1.559.991} \times 100 \% = 35.17 \%$	35.17 %	Dasar Hukum : UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Pasal 56).

Mamuju, 26 Februari 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
LPPD TAHUN 2019**

Diisioleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan
1 (satu) urusan

PROVINSI : SULAWESI BARAT

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	13 Program : (5 Program Rutin Non Teknis dan 8 Program Non Rutin Teknis Pagu Anggaran 2019 8.593.631.395,36 Realisasi Anggaran 8.305.301.856,00 = 96,64%	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 9 SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg Tugas dan Fungsi 2. SOP ttg FKDM 3. SOP ttg FPK 4. SOP ttg ORMAS 5. SOP ttg POLITIK 6. SOP ttg PEMANTAUAN ORANG ASING 7. SOP ttg PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 8. SOP ttg BUDAYA 9. Dokumen SOP 81 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat	Ada 8 Dokumen SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik & Dokumen SOP 81 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri Pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURANPER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Sebutkan Tidak Ada	Sebutkan Tidak Ada	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi Jumlah jabatan yang Ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 orang	17 x 100% 17 =100%	Es.II : 1 orang Es.III: 5 orang Es.IV :11 orang

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Tidak Ada	Tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	PNS SKPD , sebanyak 38 personil Total PNS Provinsi, Esebanyak 5.448 personil	$\frac{38}{5.448} \times 100\%$ 5.448 =69,75%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 org. Pejabat yang ada, sebanyak 12 org	$\frac{9}{12} \times 100\%$ 12 = 75%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang Ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org. Jabatan yang ada, sebanyak 17 org.	$\frac{12}{17} \times 100\%$ 17 = 70,58 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun2019.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017-2022, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada $RPJMD \times 100\%$	Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 13 program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 13 Program	$\frac{13}{13} \times 100\%$ = 100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 13 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 13 program.	$\frac{13}{13} \times 100\%$ = 100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. 	$13 \times 100\%$ 13 $= 100\%$	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Belanja SKPD, sebesar Rp.8.593.631.395.26 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.111.982.588.654,89 	$8.593.631.395.26 \times 100\%$ $2.111.982.588.654,89$ $= 40,68\%$	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Realisasi Belanja SKPD, sebesar Rp.8.305.301.856.00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.006.026.015.781,60,- 	$8.305.301.856.00$ $2.006.026.015.781,60 \times 100\%$ $= 41,40\%$	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2019

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.649.968.603.00 - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp.8.305.301.856.00 	$\frac{4.649.968.603.00}{8.305.301.856.00} \times 100\%$ 8.305.301.856.00 = 55,99%	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2019
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.655.333.253.00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.305.301.856.00 	$\frac{3.655.333.253.00}{8.305.301.856.00} \times 100\%$ 8.305.301.856.00 = 44,01%	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2019
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb: Neraca dan CaLK	Ada 1 Laporan Keuangan Ada sebanyak 1 jenis : Neraca dan CaLK	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	PENGELOLAANBARANG MILIKDAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Adaatau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis 1 dokumennya.	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	Asset yang tidak digunakan, sebanyak 54 asset. Senilai Rp.470.283.252 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 106 asset. Senilai Rp.2.435.530.268,-	54 x 100% 106 = 50,94% 470.283.252 x 100% 2.435.530.268 = 19,30%	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari BPKAD (Berita Acara Inventarisasi RekonsiliasiPenyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg Tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ Prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Telefon/Fax 4. Sistem Informasi Pelaporan Berbasis SMS Gateway	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada (difoto dilampirkan)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang	Ada/Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

Mamuju, 26 Februari 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

LAMPIRAN:I.3 FORMATIKK UNTUK PROVINSI

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \%$ %	Permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang SPM Trantibum Linmas
		52	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100 \%$ %	Permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang SPM Trantibum Linmas
		53	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun}} \times 100 \%$ %	Permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang SPM Bencana psl 4
		54	Persentase penanganan pra bencana	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana}}{\text{Jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi}} \times 100 \%$ %	Permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang SPM Bencana
		55	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana}} \times 100 \%$ %	Permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang SPM Bencana

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	4	Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat Daerah yg menangani
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	4	Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat Daerah yg menangani

Mamuju, 26 Februari 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

Lampiran 2 :

DAFTAR URUSAN WAJIB DAN PILIHAN SERTA NAMA -NAMA SKPD PENYELENGGARA.

NO	URUSAN WAJIB	NAMA SKPD PENYELENGGARA
19	Kesbang & Politik	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju, 12 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

Lampiran 4 :

RINCIAN PROGRAM KEGIATAN SKPD DALAM PELAKSANAAN URUSAN SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA.

NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	URUSAN YG DILAKSANAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ALOKASI ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI FISIK (DANA)	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA			MASALAH DAN SOLUSI		HAL LAIN YG PERLU (DILAPORKAN)	KET
									LENGGAP	CUKUP	KURANG	MASALAH	SOLUSI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	KESBANG & POLITIK	1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.	1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	420.390.000	420.390.000	408.390.000	97,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	14.028.000	14.028.000	12.273.428	87,49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.	44.495.500	44.495.500	43.836.900	98,52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			1.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	34.692.000	34.692.000	34.672.600	99,94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			1.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan.	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			1.6. Penyediaan Makanan dan Minuman.	35.400.000	35.400.000	35.390.000	99,97	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			1.7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.	270.000.000	240.000.000	239.766.369	99,90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Pengurangan Anggaran	Rasionalisasi	Tidak Ada	
			1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.	270.000.000	311.700.341	311.315.500	99,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Penambahan Anggaran	Rasionalisasi	Tidak Ada	
			Jumlah Sub	1.113.005.500	1.124.705.841	1.109.644.797	98,66								
		2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.	2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	48.425.000	48.425.000	45.305.000	93,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

NO	URUSAN YG DILAKSANAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ALOKASI ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI FISIK (DANA)	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA			MASALAH DAN SOLUSI		HAL LAIN YG PERLU DILAPORKAN	KET
									Lengkap	Cukup	Kurang	Masalah	Solusi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			2.2. Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan.	105.700.000	72.100.000	64.472.000	89,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Pengurangan Anggaran	Rasionalisasi	Tidak Ada	
			2.3. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.	134.500.000	134.500.000	104.073.650	77,38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			2.4. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor.	24.000.000	24.000.000	23.660.000	98,58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			Jumlah Sub	312.625.000	279.025.000	237.510.650	85,12								
		3.PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.	3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	98.294.350	98.294.350	97.162.450	98,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			Jumlah Sub	98.294.350	98.294.350	97.162.450	98,85								
		4.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	33.300.000	33.300.000	18.500.000	55,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			4.2. Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah.	389.560.000	310.460.000	266.029.000	85,69	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Pengurangan Anggaran	Rasionalisasi	Tidak Ada	
			4.3. Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Sulawesi Barat.	53.411.650	52.271.650	51.970.000	99,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Pengurangan Anggaran	Rasionalisasi	Tidak Ada	
			Jumlah Sub	476.271.650	396.031.650	336.499.000	84,97								
		5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.	4.1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

NO	URUSAN YG DILAKSANAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ALOKASI ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI FISIK (DANA)	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA			MASALAH DAN SOLUSI		HAL LAIN YG PERLU DILAPORKAN	KET
									Lengkap	Cukup	Kurang	Masalah	Solusi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		10. PROGRAM KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA & KEMASYARAKATAN.	10.1 Peningkatan Perang FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.	-	100.000.000	85.751.600	85,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Salah masuk nama program	APBD Perubahan pindah nama program	Tidak Ada	
			10.2 Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama.	175.000.000	173.704.667	173.404.500	99,83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Pengurangan Anggaran	Rasionalisasi	Tidak Ada	
			Jumlah Sub	175.000.000	273.704.667	259.156.100	94,68								
		11. PROGRAM FASILITAS POLITIK DALAM NEGERI.	11.1. Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.	63.560.000	63.560.000	60.663.600	95,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			11.2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.	358.348.000	358.348.000	332.987.900	92,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			11.3. Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat.	179.982.000	179.982.000	161.048.500	89,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			Jumlah Sub	601.890.000	601.890.000	554.700.000	92,16								
		12.PROGRAM BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN.	12.1 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.	75.000.000	74.528.000	74.436.000	99,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Pengurangan Anggaran	Rasionalisasi	Tidak Ada	

NO	URUSAN YG DILAKSANAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ALOKASI ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI FISIK (DANA)	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA			MASALAH DAN SOLUSI		HAL LAIN YG PERLU DILAPORKAN	KET
									LENGGAP	CUKUP	KURANG	MASALAH	SOLUSI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		13. PROGRAM PEMBINAAN KARAKTER BANGSA.	13.1 Pembentukan Kader Bela Negara Generasi Muda dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	150.000.000	143.770.400	143.560.400	99,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
			Jumlah Sub	150.000.000	143.770.400	143.560.400	99,85								
			Jumlah Total Pagu	4.802.000.000	4.868.480.360	4.649.968.803	95,51								

Mamuju, 12 Februari 2020
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI BARAT

Drs. H. MUHAMAMD RAHMAT, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19640408 198603 1 023

Lampiran 5 :**LAPORAN REALISASI ANGGARAN YANG MEMBANTU MEMBERIKAN INFORMASI ANGGARAN DAN BELANJA PER URUSAN DAN MASING-MASING JENIS BELANJA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

NAMA REKENING	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)	PERSEN (%)
1	2	3	4 (2-3)	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.700.000	4.700.000	-	100,00
Jumlah Pendapatan	4.700.000	4.700.000	-	100,00
BELANJA				
BELANJA OPERASIONAL				
Belanja Pegawai	3.725.151.035	3.655.333.253	69.817.782	98,13
Belanja Barang dan Jasa	4.820.057.360	4.604.663.603	(215.393.757)	95,53
Jumlah Belanja Operasional	8.545.208.395	8.259.996.856	(145.575.975)	96,66
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	-	-	-	0%
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	0%
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	0%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	0%
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	0%
Belanja Aset Lainnya	48.425.000	45.305.000	3.120.000	0%
Jumlah Belanja Modal	48.425.000	45.305.000	3.120.000	93,56
JUMLAH TOTAL BELANJA	8.593.633.395	8.305.301.856	(142.455.975)	96,64
SURPLUS / (DEFISIT)	(8.540.508.395)	(8.255.296.856)	145.575.975	96,66

Mamuju, 12 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

Lampiran 5 :

TABEL *): TOTAL DAN REALISASI BELANJA URUSAN WAJIB BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	URUSAN WAJIB	BELANJA TIDAK LANGSUNG	PROGRAM & KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	PERSENTASI (%)	OPD PELAKSANA	KET
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL					
1	KESBANG & POLITIK	Rp 3.725.151.035						Rp 3.688.546.751	99,02		
			I.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.	Rp -	Rp 1.124.705.841,26	Rp -	Rp 1.124.705.841,26	Rp 1.109.644.797,00	98,66		
			1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Rp -	Rp 420.390.000,00	Rp -	Rp 420.390.000,00	Rp 408.390.000,00	97,15		
			1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp -	Rp 14.028.000,00	Rp -	Rp 14.028.000,00	Rp 12.273.428,00	87,49		
			1.3. Penyediaan Alat Tulis.	Rp -	Rp 44.495.500,00	Rp -	Rp 44.495.500,00	Rp 43.836.900,00	98,52		
			1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Rp -	Rp 34.692.000,00	Rp -	Rp 34.692.000,00	Rp 34.672.600,00	99,94		
			1.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan.	Rp -	Rp 24.000.000,00	Rp -	Rp 24.000.000,00	Rp 24.000.000,00	100,00		
			1.6. Penyediaan Makanan dan Minuman.	Rp -	Rp 35.400.000,00	Rp -	Rp 35.400.000,00	Rp 35.390.000,00	99,97		
			1.7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.	Rp -	Rp 240.000.000,00	Rp -	Rp 240.000.000,00	Rp 239.766.369,00	99,90		
			1.8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.	Rp -	Rp 311.700.341,26	Rp -	Rp 311.700.341,26	Rp 311.315.500,00	99,88		
			II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.	Rp -	Rp 279.025.000,00	Rp -	Rp 279.025.000,00	Rp 237.510.650,00	85,12		
			2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Rp -	Rp 48.425.000,00	Rp -	Rp 48.425.000,00	Rp 45.305.000,00	93,56		
			2.2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan.	Rp -	Rp 72.100.000,00	Rp -	Rp 72.100.000,00	Rp 64.472.000,00	89,42		
			2.3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.	Rp -	Rp 134.500.000,00	Rp -	Rp 134.500.000,00	Rp 104.073.650,00	77,38		

NO	URUSAN WAJIB	BELANJA TIDAK LANGSUNG	PROGRAM & KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	PERSENTASI (%)	OPD PELAKSANA	KET
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL					
			2.4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Rp -	Rp 24.000.000,00	Rp -	Rp 24.000.000,00	Rp 23.660.000,00	98,58		
			III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.	Rp -	Rp 98.294.350,00	Rp -	Rp 98.294.350,00	Rp 97.162.450,00	98,85		
			3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	Rp -	Rp 98.294.350,00	Rp -	Rp 98.294.350,00	Rp 97.162.450,00	98,85		
			IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	Rp -	Rp 396.031.650,00	Rp -	Rp 396.031.650,00	Rp 336.499.000,00	84,97		
			4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Rp -	Rp 33.300.000,00	Rp -	Rp 33.300.000,00	Rp 18.500.000,00	55,56		
			4.2. Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah.	Rp -	Rp 310.460.000,00	Rp -	Rp 310.460.000,00	Rp 266.029.000,00	85,69		
			4.3. Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Sulawesi Barat.	Rp -	Rp 52.271.650,00	Rp -	Rp 52.271.650,00	Rp 51.970.000,00	99,42		
			V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.	Rp -	Rp 124.913.500,00	Rp -	Rp 124.913.500,00	Rp 123.582.000,00	98,93		
			5.1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.	Rp -	Rp 10.500.000,00	Rp -	Rp 10.500.000,00	Rp 10.500.000,00	100,00		
			5.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.	Rp -	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp 10.000.000,00	Rp 9.810.000,00	98,10		
			5.3. Penyusunan RKA / DPA-SKPD.	Rp -	Rp 12.500.000,00	Rp -	Rp 12.500.000,00	Rp 12.482.000,00	99,86		
			5.4. Penyusunan RKA-P / DPPA SKPD.	Rp -	Rp 12.500.000,00	Rp -	Rp 12.500.000,00	Rp 12.500.000,00	100,00		
			5.5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD.	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 49.066.500,00	98,13		
			5.6. Penyusunan Renstra SKPD (Perencanaan 5 Thn) dan Renja SKPD (Perencanaan 1 Thn).	Rp -	Rp 14.678.600,00	Rp -	Rp 14.678.600,00	Rp 14.678.600,00	100,00		

NO	URUSAN WAJIB	BELANJA TIDAK LANGSUNG	PROGRAM & KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	PERSENTASI (%)	OPD PELAKSANA	KET
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL					
			5.7. Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD da LKPJ.	Rp -	Rp 14.734.900,00	Rp -	Rp 14.734.900,00	Rp 14.544.900,00	98,71	Anggaran Kegiatan yg mendukung ketentraman dan keamanan.	
			VI.PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN .	Rp -	Rp 417.308.352,00	Rp -	Rp 417.308.352,00	Rp 398.274.652,00	95,44		
			6.1. Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.	Rp -	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp 150.000.000,00	Rp 143.914.900,00	95,94		
			6.2. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial.	Rp -	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp 200.000.000,00	Rp 187.051.400,00	93,53		
			6.3. Pemantauan dan Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif.	Rp -	Rp 67.308.352,00	Rp -	Rp 67.308.352,00	Rp 67.308.352,00	100,00		
			VII.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN.	Rp -	Rp 130.000.000,00	Rp -	Rp 130.000.000,00	Rp 127.409.200,00	98,01		
			7.1 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.	Rp -	Rp 130.000.000,00	Rp -	Rp 130.000.000,00	Rp 127.409.200,00	98,01		
			VIII.PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT.	Rp -	Rp 680.763.000,00	Rp -	Rp 680.763.000,00	Rp 666.778.754,00	97,95		
			8.1. Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula.	Rp -	Rp 680.763.000,00	Rp -	Rp 680.763.000,00	Rp 666.778.754,00	97,95		
			IX. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS FUNGSI DAN KEBERADAAN ORMAS.	Rp -	Rp 174.643.600,00	Rp -	Rp 174.643.600,00	Rp 173.423.000,00	99,30		
			8.1. Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan Ormas.	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 98.779.600,00	98,78		

NO	URUSAN WAJIB	BELANJA TIDAK LANGSUNG	PROGRAM & KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	PERSENTASI (%)	OPD PELAKSANA	KET
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL					
			8.2. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Se-Sulawesi Barat.	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00		
			8.3. Dialog Pemerintah dengan Ormas.	Rp -	Rp 74.643.600,00	Rp -	Rp 74.643.600,00	Rp 74.643.400,00	100,00		
			8.4. Peningkatan Peran FKUB Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00		
			X. PROGRAM KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Rp -	Rp 273.704.667,00	Rp -	Rp 273.704.667,00	Rp 259.156.100,00	94,68		
			10.1. Peningkatan Peran FKUB Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 85.751.600,00	85,75		
			10.2. Temu tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama.	Rp -	Rp 173.704.667,00	Rp -	Rp 173.704.667,00	Rp 173.404.500,00	99,83		
			XI. PROGRAM FASILITAS POLITIK DALAM NEGERI	Rp -	Rp 601.890.000,00	Rp -	Rp 601.890.000,00	Rp 554.700.000,00	92,16		
			11.1. Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.	Rp -	Rp 63.560.000,00	Rp -	Rp 63.560.000,00	Rp 60.663.600,00	95,44		
			11.2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.	Rp -	Rp 358.348.000,00	Rp -	Rp 358.348.000,00	Rp 332.987.900,00	92,92		
			11.3. Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat.	Rp -	Rp 179.982.000,00	Rp -	Rp 179.982.000,00	Rp 161.048.500,00	89,48		
			XII. PROGRAM BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Rp -	Rp 423.430.000,00	Rp -	Rp 423.430.000,00	Rp 422.267.600,00	99,73		

NO	URUSAN WAJIB	BELANJA TIDAK LANGSUNG	PROGRAM & KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	PERSENTASI (%)	OPD PELAKSANA	KET
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL					
			12.1. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.	Rp -	Rp 74.528.000,00	Rp -	Rp 74.528.000,00	Rp 74.436.000,00	99,88		
			12.2. Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbiq.	Rp -	Rp 198.902.000,00	Rp -	Rp 198.902.000,00	Rp 198.868.000,00	99,98		
			12.3. Musyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019-2024.	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp 74.946.800,00	99,93		
			12.4. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Kabupaten Se-Sulawesi Barat.	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp 74.016.800,00	98,69		
			XIII. PROGRAM PEMBINAAN KARAKTER BANGSA	Rp -	Rp 143.770.600,00	Rp -	Rp 143.770.600,00	Rp 143.560.400,00	99,85		
			13.1. Pembentukan Kader Bela Negara Generasi Muda dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	Rp -	Rp 143.770.600,00	Rp -	Rp 143.770.600,00	Rp 143.560.400,00	99,85		
TOTAL				Rp -	Rp 4.868.480.560,26	Rp -	Rp 4.868.480.560,26	Rp 4.649.968.603,00	95,51		

Mamuju, 12 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat**Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM**Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19640408 198603 1 023

Lampiran 6 :

KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

NAMA SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

URUSAN YANG DISELENGGARAKAN :

- 1) Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah.
- 2) Pembinaan Terhadap Ormas dan OKP.

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	STATUS JABATAN**)		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)									GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				Jumlah	
	ISI	KOSONG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV			
Eselon 1																					
Eselon 2 KEPALA BADAN	√							√	√					√			√	√	√	√	1
Eselon 3 SEKRETARIS	√							√	√					√			√	√	√	√	1
Eselon 4 KASUBAG. PERENCANAAN	√							√						√						√	1
Eselon 4 KASUBAG. KEUANGAN	√							√						√						√	1
Eselon 4 KASUBAG. KEPEGAWAIAN	√						√							√						√	1
Eselon 3 KABID. POLITIK																					
Eselon 4 KASUBID. KELEMBAGAAN PARTAI DAN FASILITASI PEMILU	√							√						√							1
Eselon 4 KASUBID. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK																					
Eselon 3 KEWASPADAAN NASIONAL	√							√	√					√				√	√	√	1
Eselon 4 KASUBID. KEWASPADAAN DINI, PENGAWASAN ORANG DAN LEMBAGA ASING.																					
Eselon 4 KASUBID. PENANGANAN KONFLIK DAN KERJASAMA INTELKAM																					
Eselon 3 KABID. KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	√							√						√				√	√	√	1
Eselon 4 KASUBID. KETAHANAN SENI DAN BUDAYA	√							√						√						√	1
Eselon 4 KASUBID. KETAHANAN SENI, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	√							√						√							1
Eselon 3 KABID. BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN																					
Eselon 4 KASUBID. BINA IDEOLOGI	√							√	√					√				√	√	√	1
Eselon 4 KASUBID. KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	√							√						√							1
Fungsional																					
Staf PNS																					25
Total Kualifikasi Pegawai	13																				38

Mamuju, 12 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

KETERANGAN

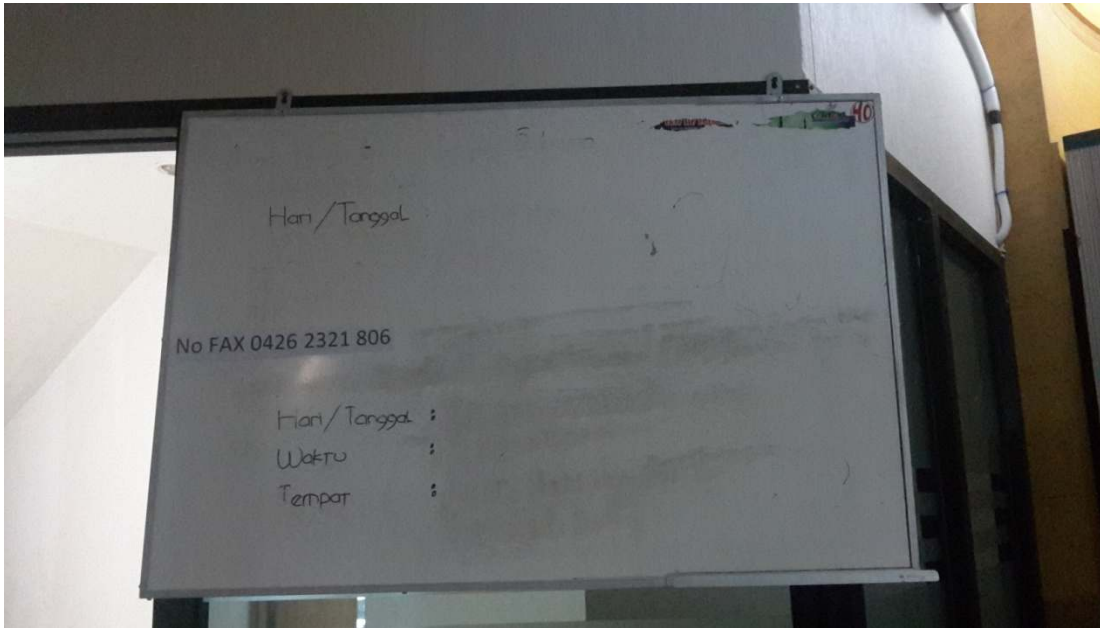
Jumlah : 17 Orang

Data Inventarisasi Barang Tahun 2019

No.	Barang Jenis	Tahun	Keadaan Barang	Harga RB & KB	Barang Jenis	Tahun
1	5	2005	Rusak Berat & Kurang Baik	103.489.980		
2	19	2006	Rusak Berat & Kurang Baik	78.285.000	1	2006
3	7	2007	Rusak Berat & Kurang Baik	49.049.938		
4	7	2008	Rusak Berat & Kurang Baik	55.200.000	1	2008
5	4	2010	Rusak Berat & Kurang Baik	17.100.000		
6					1	2012
7	9	2013	Rusak Berat & Kurang Baik	142.950.000	9	2013
8					6	2014
9	1	2015	Rusak Berat & Kurang Baik	8.000.000	4	2015
10	2	2016	Rusak Berat & Kurang Baik	16.208.334	18	2016
11					6	2017
12					3	2018
13					3	2019
	54		Total	470.283.252	52	
				Total Asset	106	

Keadaan Barang	Harga B
Baik	1.200.000
Baik	5.000.000
Baik	8.300.050
Baik	258.196.500
Baik	548.301.200
Baik	40.500.000
Baik	880.505.266
Baik	137.730.000
Baik	40.574.000
Baik	44.940.000
Total	1.965.247.016
Nilai Total	2.435.530.268

1. Papan Pengumuman



2. Telepon / Fax dan Website



3. Sistem Informasi Pelaporan Berbasis SMS Gateway

